

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

◦ **GAMBARAN INFLASI BULANAN KABUPATEN SUMBAWA**

(Perkembangan Inflasi Kabupaten Sumbawa, Atau Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Lainnya dan Jasa Serta Resiko Kedepan);

Pada Triwulan II Tahun 2026, kondisi perekonomian Kabupaten Sumbawa secara umum menunjukkan aktivitas ekonomi yang cukup baik dan didukung oleh sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, dan jasa. Aktivitas perdagangan masyarakat berjalan relatif normal, ditandai dengan tersedianya kebutuhan pokok di pasar tradisional maupun pasar modern serta meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Meskipun demikian, Kabupaten Sumbawa masih menghadapi sejumlah tantangan yang berpotensi memengaruhi stabilitas harga barang dan jasa. Tantangan tersebut terutama berkaitan dengan fluktuasi harga komoditas pangan strategis, ketergantungan pasokan beberapa komoditas dari luar daerah, keterbatasan infrastruktur distribusi, serta tingginya sensitivitas harga terhadap perubahan cuaca dan musim tanam.

Struktur ekonomi Kabupaten Sumbawa yang masih didominasi sektor primer menyebabkan stabilitas harga sangat dipengaruhi oleh kondisi produksi pertanian dan peternakan. Ketika terjadi gangguan produksi akibat cuaca, serangan hama, atau keterlambatan musim tanam, maka pasokan komoditas pangan menjadi berkurang dan berpotensi mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen.

Selain faktor produksi, sistem distribusi juga menjadi faktor penting dalam pembentukan harga. Sebagai daerah yang sebagian kebutuhan pangannya masih dipasok dari luar wilayah, Kabupaten Sumbawa rentan terhadap gangguan distribusi antarpulau maupun perubahan harga di daerah pemasok.

◦ **Perkembangan Inflasi Kabupaten Sumbawa Triwulan II Tahun 2026**

Perkembangan inflasi Kabupaten Sumbawa pada Triwulan II Tahun 2026 secara umum masih berada dalam kondisi terkendali. Namun demikian, terdapat tekanan inflasi yang berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau (volatile food), khususnya komoditas hortikultura dan peternakan.

Pergerakan harga selama periode April hingga Juni 2026 menunjukkan pola yang relatif dinamis. Pada beberapa komoditas terjadi kenaikan harga akibat berkurangnya pasokan, sedangkan pada komoditas lainnya terjadi stabilisasi seiring membaiknya distribusi dan masuknya pasokan dari daerah sentra produksi.

Secara umum, faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan inflasi Kabupaten Sumbawa selama Triwulan II Tahun 2026 meliputi:

1. Perubahan pasokan komoditas pangan strategis.
2. Fluktuasi produksi akibat faktor cuaca.
3. Kelancaran distribusi barang dan jasa.
4. Peningkatan permintaan masyarakat pada periode tertentu.

Perubahan harga komoditas di tingkat regional dan nasional.

5.

6. Tingkat ketergantungan terhadap pasokan luar daerah.

Tekanan inflasi yang terjadi selama triwulan ini masih didominasi oleh kelompok volatile food yang memiliki karakteristik harga mudah berubah dalam waktu singkat.

- **Kondisi Komoditas Pangan Strategis**

- 1. Beras

Beras masih menjadi komoditas utama yang memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas inflasi daerah. Secara umum, pasokan beras di Kabupaten Sumbawa masih berada dalam kondisi cukup aman karena didukung oleh produksi lokal yang relatif baik.

Meskipun demikian, terdapat potensi risiko yang perlu diwaspadai, antara lain perubahan musim tanam, berkurangnya luas panen pada beberapa wilayah, serta meningkatnya permintaan masyarakat pada periode tertentu.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus melakukan koordinasi dengan Perum Bulog dan instansi terkait untuk memastikan ketersediaan stok beras serta menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

- 1. Cabai Rawit dan Cabai Merah

Cabai rawit dan cabai merah menjadi komoditas yang paling sering memberikan tekanan terhadap inflasi daerah. Selama Triwulan II Tahun 2026, harga cabai mengalami fluktuasi yang cukup tinggi akibat perubahan produksi dan pasokan.

Faktor utama yang memengaruhi harga cabai antara lain:

- Perubahan pola panen.
- Kondisi cuaca yang memengaruhi produktivitas tanaman.
- Tingginya biaya distribusi.
- Ketergantungan pada pasokan dari luar wilayah tertentu.

Karakteristik cabai sebagai komoditas hortikultura yang mudah rusak menyebabkan harga sangat sensitif terhadap gangguan pasokan.

- 1. Bawang Merah

Pergerakan harga bawang merah selama Triwulan II Tahun 2026 dipengaruhi oleh kondisi produksi daerah pemasok dan kelancaran distribusi. Pada beberapa periode terjadi kenaikan harga akibat berkurangnya pasokan dari sentra produksi, namun kondisi tersebut relatif dapat dikendalikan melalui masuknya pasokan baru dari daerah pemasok.

- 1. Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras

Komoditas peternakan juga menjadi salah satu penyumbang inflasi daerah. Kenaikan harga pakan ternak, biaya distribusi, dan meningkatnya permintaan masyarakat menjadi faktor utama yang memengaruhi harga daging ayam ras dan telur ayam ras.

Kondisi ini perlu mendapat perhatian karena kedua komoditas tersebut merupakan sumber

protein utama yang banyak dikonsumsi masyarakat.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

◦ **Permasalahan Distribusi dan Rantai Pasok**

Kelancaran distribusi merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga di Kabupaten Sumbawa. Sebagai daerah kepulauan, distribusi barang sangat dipengaruhi oleh transportasi laut dan transportasi darat.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
2. Tingginya biaya transportasi dan logistik.
3. Gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem.
4. Keterbatasan sarana penyimpanan komoditas tertentu.
5. Belum optimalnya sistem distribusi untuk wilayah yang relatif jauh dari pusat perdagangan.

Kondisi tersebut menyebabkan harga beberapa komoditas mengalami kenaikan ketika terjadi keterlambatan pasokan atau gangguan distribusi.

◦ **Permasalahan Penyaluran LPG 3 Kg Bersubsidi**

Salah satu isu strategis yang berkembang selama Triwulan II Tahun 2026 adalah penyaluran LPG 3 kg bersubsidi.

Berdasarkan hasil pemantauan dan koordinasi lintas sektor, terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi perhatian, antara lain:

1. Meningkatnya kebutuhan LPG 3 kg bersubsidi di masyarakat.
2. Tingginya permintaan dari pelaku usaha mikro.
3. Distribusi LPG yang belum sepenuhnya tepat sasaran.
4. Masih ditemukannya penjualan LPG di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
5. Adanya keluhan masyarakat terkait ketersediaan LPG pada waktu-waktu tertentu.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama PT Pertamina Patra Niaga, aparat penegak hukum, dan Satgas LPG terus melakukan pengawasan melalui rapat koordinasi, monitoring lapangan, inspeksi mendadak (sidak), serta sosialisasi kepada agen dan pangkalan.

◦ **Upaya Pengendalian Inflasi yang Telah Dilaksanakan**

Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi, Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui TPID telah melaksanakan berbagai langkah strategis, antara lain:

1. Pemantauan harga harian dan ketersediaan pasokan.
2. Sidak pasar tradisional dan distributor.
3. Sidak pangkalan LPG bersubsidi.
4. Pelaksanaan operasi pasar murah.

Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM).

- 5.
6. Koordinasi dengan Perum Bulog dan PT Pertamina Patra Niaga.
7. Penguatan komunikasi publik melalui media dan perangkat daerah.
8. Penyusunan langkah antisipatif menghadapi potensi gejolak harga.
9. Persiapan pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID.

Pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi strategi 4K dalam pengendalian inflasi daerah.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

(Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi Di Kabupaten Sumbawa);

Upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Sumbawa, melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sumbawa (TPID Kab. Sumbawa) berupa kegiatan melakukan pengendalian inflasi diantaranya :

1. Operasi Pasar Murah

Dilaksanakan untuk menjaga keterjangkauan harga bahan pokok.

2. Sidak Pasar dan Pemantauan Harga

Monitoring rutin di pasar tradisional dan distributor.

3. Kerjasama Antar Daerah (KAD)

Untuk menjamin pasokan komoditas strategis seperti beras dan bawang.

4. Penguatan Ketahanan Pangan Lokal

Melalui program peningkatan produksi pertanian.

5. Pemanfaatan Data dan Digitalisasi

Penggunaan aplikasi pemantauan harga.

6. High Level Meeting (HLM) TPID

Koordinasi lintas sektor dalam pengambilan kebijakan.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Keterjangkauan Harga

Pelaksanaan operasi pasar murah, Gerakan Pangan Murah, serta monitoring harga telah memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga beberapa komoditas.

Namun demikian, efektivitas intervensi masih perlu ditingkatkan, terutama pada wilayah yang memiliki akses distribusi terbatas.

1. Ketersediaan Pasokan

Koordinasi bersama Perum Bulog, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, serta instansi terkait mampu menjaga ketersediaan sebagian besar komoditas pangan.

Meskipun demikian, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah masih menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui peningkatan produksi lokal.

1. Kelancaran Distribusi

Koordinasi lintas sektor telah mampu meminimalkan hambatan distribusi.

Namun demikian, kondisi geografis Kabupaten Sumbawa serta tingginya ketergantungan terhadap transportasi laut menyebabkan distribusi masih rentan terhadap gangguan cuaca dan perubahan jadwal pelayaran.

1. Komunikasi Efektif

Koordinasi antaranggota TPID berjalan cukup baik melalui rapat koordinasi, monitoring lapangan, serta komunikasi dengan instansi vertikal.

Penyampaian informasi kepada masyarakat juga semakin baik melalui publikasi perkembangan harga serta kegiatan pengendalian inflasi.

Ke depan, komunikasi publik perlu lebih ditingkatkan agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi pasokan, perkembangan harga, dan langkah-langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas inflasi.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Penguatan Ketersediaan Pasokan Pangan

Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan komoditas strategis, Pemerintah Kabupaten Sumbawa perlu terus memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah terkait, Perum Bulog, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota lainnya melalui skema Kerja Sama Antar Daerah (KAD).

Upaya yang perlu dilakukan meliputi:

- meningkatkan produksi komoditas pangan strategis melalui optimalisasi sektor pertanian, hortikultura, peternakan, dan perikanan;
- memperkuat cadangan pangan pemerintah sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kekurangan pasokan;
- mendorong pemanfaatan lahan pekarangan dan pengembangan kawasan pangan lokal;
- meningkatkan koordinasi dengan daerah pemasok untuk menjaga kesinambungan pasokan komoditas.

2. Penguatan Stabilitas Harga

Untuk menjaga keterjangkauan harga masyarakat, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- melaksanakan pemantauan harga secara rutin pada pasar tradisional dan distributor;
- meningkatkan intensitas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar Murah pada saat terjadi kenaikan harga;
- melakukan intervensi pasar secara tepat waktu berdasarkan hasil pemantauan harga;
- memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog dalam menjaga stabilitas harga beras.

3. Penguatan Sistem Distribusi

Kelancaran distribusi merupakan salah satu faktor penting dalam pengendalian inflasi.

Oleh karena itu diperlukan:

- penguatan koordinasi distribusi antarwilayah;
- identifikasi jalur distribusi yang berpotensi mengalami hambatan;
- percepatan penanganan gangguan distribusi akibat cuaca maupun kendala transportasi;
- peningkatan koordinasi dengan instansi terkait untuk menjaga kelancaran distribusi komoditas strategis.

4. Penguatan Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg Bersubsidi

Distribusi LPG 3 kg bersubsidi menjadi salah satu isu strategis yang memerlukan perhatian khusus.

Rekomendasi yang perlu dilaksanakan antara lain:

- meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa, PT Pertamina Patra Niaga, agen, dan pangkalan LPG;
- melaksanakan monitoring dan inspeksi secara berkala terhadap penyaluran LPG 3 kg bersubsidi;
- memperkuat peran Satgas LPG Kabupaten Sumbawa dalam melakukan pengawasan distribusi;
- meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme penyaluran LPG bersubsidi;
- melakukan evaluasi terhadap distribusi LPG berdasarkan hasil monitoring lapangan.

5. Penguatan Data dan Sistem Informasi

Pengambilan kebijakan yang tepat memerlukan dukungan data yang akurat dan mutakhir.

Oleh karena itu perlu dilakukan:

peningkatan kualitas pemantauan harga dan stok pangan;

optimalisasi pemanfaatan sistem informasi pengendalian inflasi daerah;

integrasi data harga, stok, dan distribusi antarperangkat daerah;

penguatan analisis berbasis data (evidence-based policy) sebagai dasar pengambilan kebijakan.

6. Penguatan Koordinasi TPID

Koordinasi yang efektif merupakan kunci keberhasilan pengendalian inflasi. Untuk itu diperlukan:

- pelaksanaan rapat koordinasi TPID secara berkala;
- peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMN, pelaku usaha, dan masyarakat;
- peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil rapat TPID.

7. Pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID

Dalam rangka memperkuat komitmen dan sinergi pengendalian inflasi, Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan melaksanakan High Level Meeting (HLM) TPID sebagai forum koordinasi strategis.

HLM TPID diharapkan dapat menghasilkan:

- komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan;
- rumusan kebijakan pengendalian inflasi Semester II Tahun 2026;
- rencana aksi pengendalian inflasi yang terukur;
- penguatan koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga.